

## MEMO HUKUM

*YUSTISI DIAH PRAMUKTI*

ANALISA HUKUM TENTANG KEWENANGAN JAKSA  
SEBAGAI PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

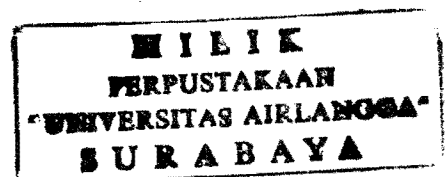


KK.

Pid. 712/96

Pra

a



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
**1996**

**ANALISA HUKUM TENTANG KEWENANGAN JAKSA  
SEBAGAI PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN**



**MEMO HUKUM**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Pembimbing,**

**RICHARD WAHJOEDI, S.H., MS.**  
**NIP. 130 531 815**

**Penyusun,**

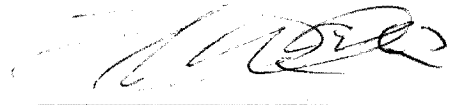
**YUSTISI DIAH PRAMUKTI**  
**NIM. 039213584**

## HALAMAN PENGESAHAN

Memo Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 1996, jam 09.00 WIB.

Dengan Tim Penguji :

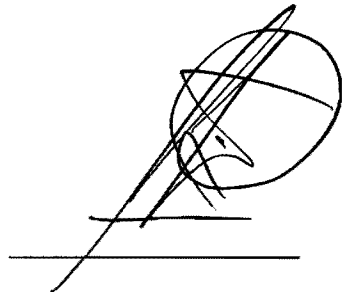
Ketua : Soedarti,SH.  
NIP.130 675 523



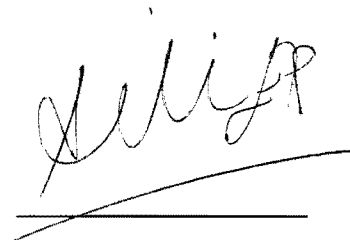
Sekretaris : Soeharjo,SH  
NIP.130.517.139



Anggota I : Richard Wahjoedi,SH.MS  
NIP.130 531 835



Anggota II : Didik Endro Purwoleksono,SH.MH  
NIP. 131 570 341



## VI. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan di muka maka saya memberikan kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

### 1. Kesimpulan

- a. Mengenai penjatuhan putusan pidana tambahan yang berupa pengusiran atau deportasi terhadap orang asing dari wilayah Indonesia yang dijatuhkan hakim di sidang pengadilan pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 10 KUHP Jo Pasal 270 KUHP tetapi karena mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berupa pengusiran tersebut sulit dilaksanakan oleh jaksa dan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan tersebut serta tindak pidana yang telah dilakukan merupakan Tindak Pidana Khusus dibidang keimigrasian yang pelaksanaanya merupakan wewenang dari Direktorat Jenderal Imigrasi, maka untuk penyelesaian kasus yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada asas Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu: "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*".

- b. Pada umumnya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap di tangan jaksa akan tetapi jika hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan yang berupa pengusiran/deportasi terhadap orang asing tersebut. Tindakan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga keputusan tersebut sulit untuk

dilaksanakan oleh jaksa. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut sebagaimana diatur dalam surat edaran No. SE.R-131/OPT-0/6/1980 jaksa harus menyampaikan laporan ke Kejaksaan Agung agar menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Kehakiman yang berwenang memberikan keputusan perlu tidaknya orang asing tersebut dikenakan tindakan keimigrasian berupa pen deportasian dari wilayah Indonesia sehingga tercapai suatu kerjasama yang baik antar instansi terkait untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum, sehingga pelaksana putusan tetap ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi, jadi di sini hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan khususnya terhadap pidana tambahan yang berupa pengusiran atau pen deportasian terhadap orang asing dari wilayah Indonesia berdasarkan pada keyakinannya (*Negatief Wettelijk*) dan sebagai pelaksana putusannya dibebankan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

## 2. Saran

- a. Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh jaksa sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur maka hendaknya para pembentuk undang-undang mengantisipasi lebih lanjut untuk segera membentuk peraturan secara khusus, sehingga jaksa serta penegak hukum lainnya mempunyai pedoman khusus untuk pelaksanaan keputusan tersebut.
- b. Pada umumnya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan terhadap orang asing pelaku Tindak Pidana Keimigrasian adalah

ringan, jadi hal ini tidak membuat jera orang asing pelaku Tindak Pidana Keimigrasian tersebut malah cenderung untuk melakukan pelanggaran, oleh karena itu hendaknya terhadap pelaku Tindak Pidana Keimigrasian diberikan sanksi pidana yang lebih berat.

- c. Untuk mencapai tujuan yang sama di bidang penegakan hukum yaitu mencapai keadilan dan kepastian hukum hendaknya para penegak hukum menghindari kontradiksi dan instansional centris dalam pelaksanaan tugas-tugas, tetapi harus menciptakan iklim kerjasama yang baik dengan prinsip integrasi, prinsip sinkronisasi dan prinsip koordinasi walaupun masing-masing instansi tersebut mempunyai diferensiasi dan spesialisasi tugas, wewenang dan tanggung jawab sendiri-sendiri.